

**FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI



Nadia Salsabella

19220066

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nadia Salsabella
NIM : 19220066
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Disetujui dan disahkan:

Hari : Sabtu

Tanggal : 12 Januari 2023

Pembimbing,



Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M
NIDN. 0607098403

Mengetahui,

Kepala Program Studi S1 Akuntansi



Astuningsih Sahardjati, S.E., M.Acc
NIDN. 0606129102

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nadia Salsabella
NIM : 19220066
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah

Skrripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi.

Hari : Jumat
Tanggal : 24 Februari 2023

Tim Penguji

Ketua : Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M
Anggota : Eko Triyanto, S.E., M.M

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua STIE Surakarta



Dr. Budi Istivanto, S.E., M.M., M.H
NIDN. 0625127401

PERNYATAAN PENULIS

Pernyataan Keaslian Skripsi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul :

FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi lain dan tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri dengan melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau plagiasi, sanksi sesuai peraturan akan saya terima.

Sukoharjo, 12 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Nadia Salsabella

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al- Insyirah : 5)

“Jangan takut untuk mencoba, gagal coba lagi sampai bisa. Jangan mudah berputus asa”

(Penulis)

Karya kecil ini ku persembahkan untuk :

Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa telah memberikan doa, dukungan, dan semangat

Kakak, adik dan segenap keluarga yang selalu memberikan semangat serta dukungan

Terima Kasih

KATA PENGANTAR

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi strata 1 (S1) Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan doa, dukungan, dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Budi Istiyanto, S.E., M.M., M.H. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
2. Astuning Saharsini, S.E., M.Acc selaku Kepala Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta
3. Arif Nugroho Rachman, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan
4. Eko Triyanto, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan
6. Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa, kasih sayang serta dukungan
7. Kakak, adik dan segenap keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan
8. Teman – teman kelas Akuntansi A R2 yang telah memberikan semangat dan motivasi
9. Pihak – pihak lain yang telah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir

Penulis berharap tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari jika masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun.

Sukoharjo, 12 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN PENULIS	iv
MOTTO DAN PESEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9
1. Teori Keagenan	9
2. Belanja Modal	9
3. Pertumbuhan Ekonomi.....	10
4. Pendapatan Asli Daerah	10
5. Dana Alokasi Umum.....	11
6. Dana Alokasi Khusus.....	11

7. Dana Bagi Hasil	11
8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	12
B. Penelitian Terdahulu	12
C. Kerangka Pikir	15
D. Hipotesis.....	16
1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal	16
2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal	16
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal	17
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal	17
5. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal	18
6. Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal.....	18
7. Pengaruh Secara Simultan Faktor-Faktor Terhadap Belanja	19
BAB II METODE PENELITIAN	20
A. Objek Penelitian	20
B. Jenis dan Sumber Data	20
C. Populasi dan Sampel	21
D. Teknik Pengumpulan Data	21
E. Variabel Penelitian	21
F. Definisi Operasional.....	22
G. Teknik Analisis Data.....	24
1. Statitika Deskriptif	24
2. Uji Asumsi Klasik.....	24
3. Uji Regresi Linier Berganda	25
4. Uji Hipotesis	26
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	27
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	27
B. Deskripsi Populasi dan Sampel Penelitian.....	27
C. Analisis Data	30
1. Statistika Deskriptif.....	30

2. Uji Asumsi Klasik	31
3. Uji Regresi Linier Berganda	35
4. Uji Hipotesis	37
D. Pembahasan.....	41
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
A. Kesimpulan	45
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2019-2021	2
Tabel 1.2 Data Keuangan Pemda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021 ...	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	13
Tabel 3.1 Definisi Operasional	23
Tabel 4.1 Populasi Penelitian	29
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	30
Tabel 4.3 Normalitas	31
Tabel 4.4 Multikolinieritas	32
Tabel 4.5 Heteroskedastisitas	34
Tabel 4.6 Autokorelasi	34
Tabel 4.7 Autokorelasi <i>Transform</i>	35
Tabel 4.8 Regresi Linier Berganda	35
Tabel 4.9 Uji Parsial T	37
Tabel 4.10 Uji Simultan F	39
Tabel 4.11 Koefisien R	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Simpanan Dana	2
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	15
Gambar 4.1 <i>Scatterplot</i>	33

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Daftar Singkatan
- 2 Data Penelitian
- 3 Data Nilai Produk Domestik Regional Bruto
- 4 Hasil Olah Data SPSS 22.0

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019 sampai 2021 dikarenakan dana Pemda yang mengendap di Bank terlalu tinggi. Faktor – faktor tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan SILPA. Populasi pada penelitian ini adalah kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan, sampel pada penelitian ini diambil dengan teknik sampel jenuh maka diperoleh sampel sebanyak 35 dari 6 kota dan 29 kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari *website* DJPK dan BPS. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, statistika deskriptif dan pengujian hipotesis yang dibantu dengan *software* SPSS 22. Hasil dari uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara parsial pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan SILPA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal.

Kata Kunci : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil , SILPA

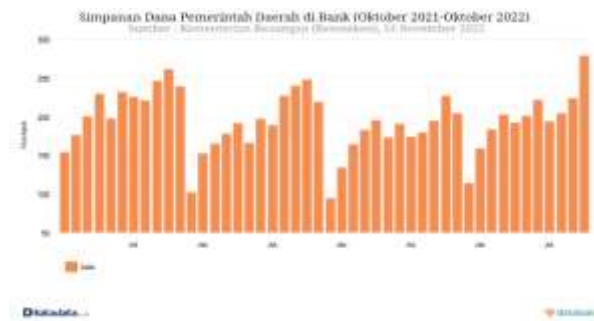
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau yang didalamnya terdapat berbagai provinsi, kota, dan kabupaten. Peristiwa krisis moneter pada tahun 1998 menjadikan Indonesia mengubah pelimpahan wewenang pemerintahan yang semula dilimpahkan semua kepada pemerintah pusat digantikan dengan pemerintah pusat melimpahkan sebagian wewenang kepada pemerintah daerah terutama pada hal mengelola anggaran (keuangan) di daerah tersebut sesuai dengan undang undang yang berlaku yang disebut dengan otonomi daerah. Otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kemampuan daerah tersebut (Fathia, 2020).

Bentuk otonomi daerah adalah hal pengelolaan anggaran belanja daerah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja modal merupakan suatu pengeluaran anggaran yang dilakukan untuk pengadaan aset tetap atau aset lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun, yang didalamnya termasuk juga biaya pemeliharaan aset tersebut. Belanja modal pada umumnya digunakan untuk membiayai seluruh sarana dan prasarana yang menunjang kebutuhan pelayanan publik (Maulana, dkk. 2020).



Gambar 1.1 Simpanan Dana Pemda

Sumber : Katadata.com

Sri Mulyani berpendapat bahwa dana pemda yang berada di bank mengalami kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Pada Januari tahun 2019 saldo tercatat Rp 153,5 triliun, akhir tahun 2021 saldo tercatat Rp 113,38 triliun, sampai dengan bulan April tahun 2022 saldo menunjukkan Rp 191,5 triliun dan kembali naik pada bulan Mei bahkan di bulan Oktober tahun 2022 saldo tercatat mencapai 278,73 triliun. Catatan saldo tersimpan tertinggi berada di wilayah Jawa Timur yaitu sebesar Rp 27,18 triliun selain itu Jawa Tengah dan Jawa Barat menjadi provinsi dengan anggaran tertinggi yang masih berada di bank dengan kisaran saldo tercatat kurang lebih Rp 20 triliun.

Tabel 1.1 Alokasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2019-2021

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
Tahun	2019	2020	2021
Belanja Pegawai	Rp 38.388,30 M	Rp 37.226,82 M	Rp 37.095,76 M
Belanja Modal	Rp 15.513,38 M	Rp 9.914,82 M	Rp 11.376,72 M

Sumber : Dirjen Perimbangan Keuangan

Sri Mulyani mengatakan bahwa hal ini mengartikan pemerintah daerah cenderung menggunakan dana tersebut untuk belanja pegawai dan lambat dalam melakukan belanja modal atau belanja lain untuk memberikan manfaat yang optimal dengan segera kepada masyarakat. Belanja pegawai menurut kementerian keuangan adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi. Pemerintah lebih banyak memakai dana nya untuk membiayai belanja gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) , honor, tunjangan hingga kebutuhan birokrat seperti uang perjalanan dinas dikarenakan jumlah PNS yang relatif tinggi dan standar tunjangan kinerja dan honorarium yang lebih besar dari standar pemerintah pusat (Bisnis.com).

Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang mandiri melalui belanja modal yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Pemerintah juga diberikan wewenang untuk memanfaatkan sumber keuangan dari daerahnya sendiri yaitu pendapatan asli daerah. Suatu daerah belum pasti memiliki pendapatan asli daerah yang besar untuk memenuhi kebutuhannya. Dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi

pembiayaan kebutuhan belanja daerah baik secara umum maupun khusus (Maulana, dkk ., 2020).

Tabel 1.2 Data Keuangan Pemda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2021

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah			
Tahun	2019	2020	2021
Belanja Modal	Rp 15.513,38 M	Rp 9.914,82 M	Rp 11.376,72 M
PAD	Rp 28.648,04 M	Rp 28.056,37 M	Rp 31.611,20 M
SILPA	Rp 8.171,72 M	Rp 7.319,19 M	Rp 8.017,15 M
DAU	Rp 38.960,88 M	Rp 35.323,98 M	Rp 34.967,45 M
DAK	Rp 17.708,68 M	Rp 17.461,41 M	Rp 18.613,84 M
DBH	Rp 2.006,27 M	Rp 2.629,31 M	Rp 3.353,30 M
Pertumbuhan Ekonomi	5,5%	-2,6%	3,3%

Sumber : BPS dan DJPK

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Dirjen Perimbangan Keuangan menunjukkan bahwa belanja modal, pendapatan asli daerah, SILPA, dana alokasi umum, dan pertumbuhan ekonomi berada di fase fluktuatif. Tahun 2019 menuju tahun 2020 mengalami penurunan, namun di tahun 2021 mengalami kenaikan. Dana alokasi khusus dan dana bagi hasil setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2021 pendapatan asli daerah meingkat sebesar 16%, SILPA sebesar 30%, dana alokasi umum sebesar 1,01% , dana bagi hasil sebesar 1,83% , pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9%, dan dana alokasi khusus menurun sebesar 2,42%. Belanja modal pada tahun 2021 hanya mengalami kenaikan sebesar 24%, hal ini mengartikan bahwa kenaikan belanja modal tidak selaras dengan kenaikan

dari pendapatan asli daerah, SILPA, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan pertumbuhan ekonomi.

Fathia (2020) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan menurut Firza (2022) pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus menurut penelitian dari Dwi (2022) berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan menurut Kharismadani (2019) dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Pendapatan asli daerah menurut Maulana, dkk (2020) berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan menurut Waskito, dkk (2019) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Dana bagi hasil berdasarkan penelitian dari Dwi (2022) berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan menurut Waskito, dkk (2019) tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian dari Dwi (2022) SILPA berpengaruh terhadap belanja modal, lain dengan penelitian Kharismadani (2019) yang menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi belanja modal di suatu pemerintahan daerah. Melalui variabel pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dan SILPA yang mengacu pada penelitian dari Maulana, dkk (2020). Penambahan variabel SILPA dikarenakan SILPA berkaitan dengan belanja modal melalui sisa anggaran yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah?
4. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah?
5. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah?
6. Apakah sisa lebih pembayaran anggaran berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah?
7. Apakah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan silpa secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal pemerintah daerah.

2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja modal pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal pemerintah daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal pemerintah daerah.
6. Untuk mengetahui pengaruh sisa lebih pembayaran anggaran terhadap belanja modal pemerintah daerah.
7. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan silpa secara simultan terhadap belanja modal pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki dua manfaat antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dalam hal menyusun anggaran belanja modal di daerahnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan pengetahuan tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada pemerintah daerah terutama di pemerintah daerah Provinsi

Jawa Tengah, ada pula dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Keagenan

Menurut Meckling (1976) teori keagenan merupakan suatu persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yakni pihak *principal* sebagai pihak pertama yang memberi wewenang kepada *agent* sebagai pihak kedua untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Teori keagenan ini telah dipraktikkan dalam sektor publik di Indonesia dapat dilihat dari kaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat berkedudukan sebagai *principal* dan pemerintah daerah sebagai *agent*. Principal memiliki wewenang untuk memberikan peraturan kepada *agent* dan sumber daya berupa anggaran yang nanti nya akan dikelola oleh *agent* dengan menyertakan laporan pertanggungjawaban terhadap anggaran tersebut. Teori keagenan juga menyatakan bahwa apabila keputusan *agent* keliru atau merugikan akan menimbulkan masalah keagenan, maka dari itu dengan teori ini dapat menyelaraskan kepentingan *agent* dan *principal* agar tidak terjadi konflik (Maulana, dkk., 2020).

2. Belanja Modal

Menurut *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari

satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Belanja modal biasanya digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana bagi masyarakat seperti perbaikan dan pembangunan fasilitas publik yang layak.

3. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Kemenkeu adalah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi sangat diharapkan atau menjadi salah satu prioritas untuk pemerintah daerah dalam mengembangkan daerahnya dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau pendapatan nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (Gede, dkk., 2017).

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber ekonomi yang penting bagi daerah untuk memenuhi belanjanya khususnya untuk belanja modal. Pendapatan Asli Daerah didapatkan

dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain lain (Maulana, dkk., 2020).

5. Dana Alokasi Umum

Menurut *Undang Undang No 23 Tahun 2014*, Dana Alokasi Umum yang disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dipergunakan agar terciptanya stabilitas perekonomian, untuk menghindari kesenjangan antar daerah, dan pemerataan keuangan (Dwi, 2022).

6. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus yang disingkat DAK menurut *Undang Undang No 23 Tahun 2014* adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Dana Bagi Hasil

Menurut *Undang Undang No 23 Tahun 2014*, Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Bagi Hasil harus digunakan oleh pemerintah daerah untuk

membangun dan mensejahterakan masyarakat melalui pengelolaan kekayaan daerah yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya digunakan untuk belanja modal.

8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Menurut *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*, SILPA adalah selisih lebih antara penerimaan dan pengeluaran selama satu periode laporan atau Surplus yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya. SILPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atau beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya (Kharismadani, 2019).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Waskito, dkk (2019) tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap belanja modal dengan sampel kab/kota yang berada di Provinsi Aceh. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini akan dilakukan dengan pedoman penelitian terdahulu yang dapat dijelaskan hasilnya melalui tabel berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

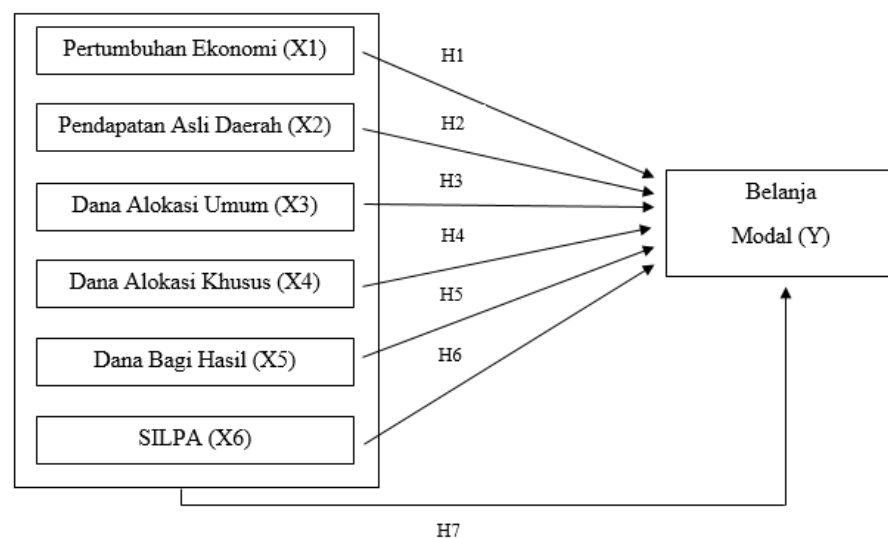
No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Hasil
1	Waskito, Zuhrotun, dan Rusherlisyani (2019)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)	X1 – Pertumbuhan Ekonomi X2 – PAD X3 – DAU X4 – DAK X5 – DBH	Belanja Modal	DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan Pertumbuhan ekonomi, PAD, dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
2	Pramundita B. dan Dedi Rusdi (2020)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2015-2018)	X1 – Pertumbuhan Ekonomi X2 – DAU X3 – DAK X4 – DBH X5 – PAD	Belanja Modal	Pertumbuhan Ekonomi dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan DAU, DAK, dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal.
3	Oktaviana Dwi M (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah 2015-2018)	X1 – PAD X2 – DBH X3 – DAU X4 – DAK X5 – SILPA	Belanja Modal	DBH, DAU, DAK, dan SILPA berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

4	Ilham Ahmad M., dkk (2020)	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah	X1 – PAD X2 – DAU X3 – SILPA	Belanja Modal	PAD, SILPA, dan Luas wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
5	Diah Ayu K., dkk (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK) Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014 – 2018	X1 – PAD X2 – DAK X3 – SILPA	Belanja Modal	PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan DAK dan SILPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
6	M. Firza Alpi dan Rio Febrian Sirait (2022)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara	X1 – Pertumbuhan Ekonomi X2 – PAD X3 – DAU X4 - DAK	Belanja Modal	Pertumbuhan ekonomi dan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh terhadap belanja modal.
7	Ufi Rumefi (2018)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Belanja Modal	X1 – Pertumbuhan Ekonomi X2 – PAD X3 - DAU	Belanja Modal	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh sedangkan PAD dan DAU berpengaruh terhadap belanja modal.

8	Egi Nofrizal, dkk (2017)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015	X1 – Pertumbuhan Ekonomi X2 – PAD	Belanja Modal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan PAD berpengaruh terhadap belanja modal
---	--------------------------	---	--------------------------------------	---------------	---

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2017). Peneliti berdasarkan referensi dari penelitian terdahulu yang mengacu pada penelitian Waskito, dkk (2019) dengan menambahkan satu variabel yaitu SILPA, maka dibentuk kerangka pikir baru sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara dari sebuah rumusan masalah yang kemudian akan diuji kebenarannya (Sugiyono, 2017). Hipotesis dari penelitian ini antara lain :

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output perkapita yang diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ditunjukkan dengan adanya peningkatan nilai dari PDRB, hal itu dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi dikeadaan yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan memudahkan pemerintah untuk melakukan belanja modal, sehingga belanja modal akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun akan membuat belanja modal juga ikut menurun. Penelitian dari Ayem (2018) dan Fathia (2020) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

H1 : Pertumbuhan Ekonomi Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

2. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan yang diperoleh dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut dan dipergunakan untuk memenuhi belanja daerah khususnya belanja modal (Waskito, dkk., 2019). Daerah yang ditunjang sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh terhadap tingkat

produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, sehingga apabila banyak investor yang menanamkan modal nya pendapatan asli daerah akan meningkat dan sebaliknya (Ayem, 2018).

H2 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi umum adalah salah satu dana perimbangan dari APBN yang digunakan untuk pemerataan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum memiliki hubungan antara belanja modal, apabila dana alokasi umum meningkat maka belanja modal akan meningkat (Febriana, 2015). Penelitian Rumefi (2018) dan Waskito, dkk (2019) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

H3 : Dana Alokasi Umum Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana alokasi khusus adalah salah satu dana perimbangan selain dana alokasi umum. Dana alokasi khusus digunakan untuk membantu meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat, apabila pemberian dana meningkat maka dapat digunakan untuk pengeluaran belanja modal. Penelitian Dwi (2022) dan Fathia (2020) mengatakan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

H4 : Dana Alokasi Khusus Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

5. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana bagi hasil juga menjadi salah satu komponen dalam dana perimbangan yang terdiri dari penerimaan pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan langsung dengan masyarakat seperti peningkatan layanan publik. Dana bagi hasil dapat dikatakan juga sebagai penerimaan atau pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui belanja modal. Penelitian dari Dwi dan Noor (2022) mengatakan bahwa dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

H5 : Dana Bagi Hasil Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

6. Pengaruh SILPA Terhadap Belanja Modal

SILPA adalah selisih lebih dari realisasi anggaran yang mana sisa lebih dari anggaran tahun sebelumnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang belum selesai atau dapat menjadi penerimaan ditahun berikutnya. Penelitian Dwi (2022) menjelaskan bahwa SILPA berpengaruh terhadap belanja modal.

H6 : SILPA Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

7. Pengaruh Secara Simultan Faktor – Faktor Terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah meningkat akan membuat belanja modal di daerah tersebut juga meningkat. Pemerintah pusat memberikan anggaran berupa DAU, DAK, DBH yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik, dengan dana tersebut maka dapat menambah atau meningkatkan belanja modal. Pemerintah daerah juga memiliki pendapatan asli daerah yang berasal dari pengembangan sumber daya di daerah tersebut, apabila pendapatan meningkat maka belanja modal juga ikut meningkat. SILPA adalah sisa pembiayaan yang bisa menjadi tambahan pendapatan untuk daerah tersebut, hal ini dapat mendorong pemerintah untuk memakai dana tersebut dalam rangka meningkatkan belanja modal untuk kebutuhan masyarakat. Penelitian dari Fathia (2020) mengatakan bahwa secara simultan faktor-faktor tersebut berpengaruh.

H7 : Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Secara Simultan Berpengaruh Terhadap Belanja Modal

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi belanja modal pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2021 dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bagi hasil tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.

6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SILPA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.
7. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan SILPA secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.

B. Saran

Kesimpulan yang telah diuraikan pada penelitian ini dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebaiknya harus lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menggali potensi sumber daya yang ada di daerah Jawa Tengah meskipun pendapatan asli daerah dinilai sudah cukup baik dan mengatur pengalokasian dana alokasi umum untuk belanja modal dengan baik agar pemerintah daerah dalam melakukan belanja modal tidak terlalu menggantungkan nya kepada dana alokasi umum, sehingga pemanfaatan pendapatan asli daerah dapat dimanfaatkan dengan baik. Dengan hal itu dana pemerintah daerah Jawa Tengah yang mengendap di bank dapat sedikit berkurang dengan memanfaatkan nya untuk belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 2(2), 169–182.
- Badan Pusat Statistik (BPS). *Bps.go.id*
- Bisnis.com. (n.d.). *Sri Mulyani Geram Uang Pemda di Bank Capai 200 Triliun*.
- Diah Ayu Kharismadani, Y. H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2014-2018. *Surakarta Accounting Review (Sarev)*, 1(1), 26–33.
- Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK). *Djpk.kemenkeu.go.id*
- Dwi, O. (2022). *Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK, dan SILPA terhadap Anggaran Belanja Modal Pada Kab/Kota Di Provinsi Jawa tengah*. 1–23.
- Fathia & Rusdi. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 379–396.
- Febriana, I. S., & Praptoyo, S. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(9), 1–22.
- Firza, M. (2022). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara*.
- Gede, D., Atika, Y., Putu, S., Ni, K., & Gde, L. (2017). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Alokasi Belanja Modal Kabupaten/Kota Se-Bali*. 9(1), 15–29.
- Halim, A. (2014). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Edisi 2). Salemba Empat.
- Katadata.co.id. (n.d.). *Simpanan Dana Pemda Di Bank (2019-2022)*.
- Maulana, I. A., Masitoh, E., & Dewi, R. R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 86.
- Meckling, M. C. J. and W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696.

- Noor, A. (2022). *Pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, DBH terhadap belanja modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2018)*.
- Nofrizal, E. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2011-2015. Skripsi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Rumefi, U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(2), 122–130.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (Edisi Ke 3). Alfabeta.
- Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *JEMMA | Journal of Economic, Management and Accounting*, 2(2), 30.
- Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang Undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Waskito, W., Zuhrotun, Z., & Rusherlisyani, R. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.
- Wibisana, A., & Noormansyah, I. (2020). *Pengaruh Internet Financial Reporting Dan Good Coporate Governance Terhadap Perusahaan*. 1–18.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Singkatan

DAFTAR SINGKATAN

APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DAK	Dana Alokasi Khusus
DAU	Dana Alokasi Umum
DBH	Dana Bagi Hasil
LRA	Laporan Realisasi Anggaran
PAD	Pendapatan Asli Daerah
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto
SILPA	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran